

Legal standing warga negara asing dalam perkara pengujian undang-undang (judicial review) di Mahkamah Konstitusi Indonesia (studi kasus perkara nomor 2-3/PUU-V/2007/tentang pengujian UU narkotika) / Ria Indriyani

Ria Indriyani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20270044&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berhak untuk menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, salah satunya adalah perorangan warga negara Indonesia.

Dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Narkotika, 3 dari 5 orang Pemohonannya adalah warga negara asing (warga negara Australia) yang turut mengajukan permohonan mengenai ketentuan pidana mati untuk perkara Narkotika. Pemohon warga negara asing ini turut merasa dirugikan dengan pemberlakuan ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika.

Yang akan diteliti adalah kedudukan hukum warga negara asing ini menurut Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum warga negara asing, terkait dengan penjatuhan hukuman pidana mati untuk perkara kejahatan narkotika.

ABSTRACT

Requirements for someone who want to be an applicant in Constitutional Court of Republic Indonesia is citizens of Indonesia, who aggrieved his standing to sue on an Act.

In the matter of application number 2-3/PUU-V/2007 about Judicial Review of Narcotics Act, 3 from 5 applicant are foreign citizens (citizens of Australia) which apply the provisions of the criminal narcotic to death. The applicant foreign citizens participated in this feel aggrieved with the provisions of criminal death in Act drug. Which will be discussed here is how the legal position of foreign citizens according to this Constitutional Court.